



djp

Laporan Kinerja 2024



Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jawa Barat II

LAPORAN
KINERJA
KANTOR WILAYAH DJP
JAWA BARAT II
2024

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang.....	3
B.	Tugas dan Fungsi.....	3
C.	Struktur Organisasi.....	4
D.	Wilayah Kerja.....	5
E.	Profil SDM.....	6
F.	Peran Strategis Organisasi.....	8
G.	Sistematika Laporan.....	9
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
A.	Penetapan Kinerja.....	11
B.	Pengukuran Kinerja.....	13
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
A.	Capaian Kinerja Organisasi.....	15
B.	Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	16
C.	Realisasi Anggaran	35
BAB IV	PENUTUP	
	Penutup.....	37

KATA PENGANTAR

Rasa syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan tugas selama periode tahun 2024.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJP Jawa Barat II Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Pelaporan Kinerja.

LAKIN Kanwil DJP Jawa Barat II tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis pada tahun Anggaran 2024 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Two tahun 2024 Kanwil DJP Jawa Barat II dengan berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sebagai wujud implementasi anggaran berbasis kinerja.

Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Kanwil DJP Jawa Barat II.

Selama tahun 2024 Kanwil DJP Jawa Barat II telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai wujud pelaksanaan Kontrak Kinerja Kanwil DJP Jawa Barat II yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam Laporan Kinerja ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi IKU dengan kontrak kinerja tahun 2024. Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJP Jawa Barat II mencapai **108,74%**.



Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif yaitu *stakeholders perspective* (30,21%), *customers perspective* (20,12%), *internal process perspective* (29,01%), dan *learning and growth perspective* (29,40%).

Dalam kesempatan ini, selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, kami sampaikan ucapan terimakasih atas segala daya, upaya, pikiran, dan waktu yang telah diberikan oleh seluruh pegawai di lingkungan kerja KPP & Kanwil DJP Jawa Barat II atas capaian yang telah diperoleh, semoga di masa yang akan datang dapat lebih ditingkatkan dan disempurnakan guna mencapai hasil kerja yang terbaik.

Demikian LAKIN tahun 2024 ini disampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di tahun-tahun yang akan datang.

Bekasi, 30 Januari 2025
Kepala Kantor
Kanwil DJP Jawa Barat II



Ditandatangani secara elektronik
R. Dasto Ledyanto



BAB I

PENDAHULUAN

- A Latar Belakang
- B Tugas dan Fungsi
- C Struktur Organisasi
- D Wilayah Kerja
- E Profil SDM
- F Peran Strategis Organisasi
- G Sistematika Laporan



Lokasi Wisata
Ade Irma
Cirebon

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan *prudent* sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kanwil DJP Jawa Barat II dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan dan mencapai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari para *stakeholder* demi perbaikan kinerja Kanwil DJP Jawa Barat II. Disamping itu Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas dan Fungsi

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

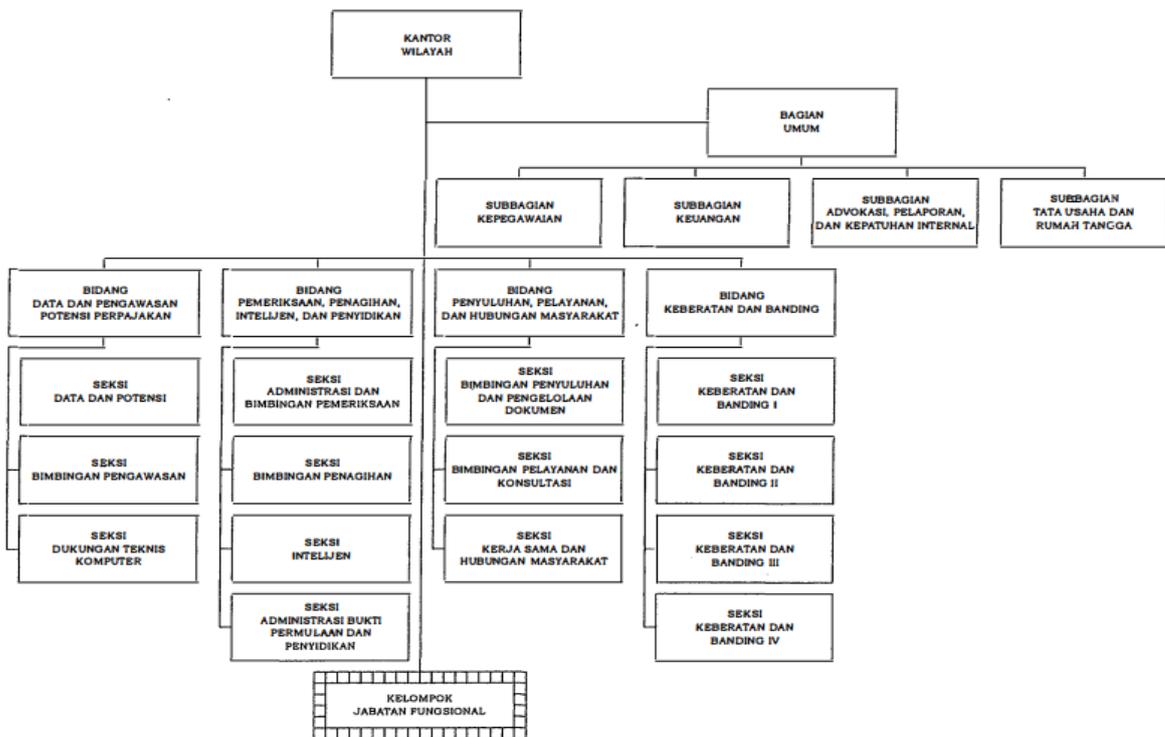
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II menyelenggarakan fungsi :

- a. analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;
- d. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;

- f. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan;
- g. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan/ atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak;
- h. pelaksanaan urusan gugatan dan banding;
- i. pengelolaan data, arsip perpajakan dan non perpajakan
- j. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- k. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal.

C. Struktur Organisasi

Struktur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II adalah sebagai berikut:



Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II adalah sebagai berikut:

- 1) Bagian Umum
 - Terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian,
 - b. Sub Bagian Keuangan,
 - c. Sub Bagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal, dan
 - d. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
- 2) Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan
 - Terdiri atas :
 - a. Seksi Dukungan Teknis Komputer,

- b. Seksi Bimbingan Pengawasan dan
- c. Seksi Data dan Potensi.
- 3) Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian
Terdiri atas :
 - a. Seksi Bimbingan Pendaftaran,
 - b. Seksi Bimbingan Ekstensifikasi, dan
 - c. Seksi Bimbingan Pendataan dan Penilaian dan Pengenaan.
- 4) Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan.
Terdiri atas :
 - a. Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan,
 - b. Seksi Bimbingan Penagihan,
 - c. Seksi Intelijen, dan
 - d. Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan.
- 5) Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Terdiri atas :
 - a. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen,
 - b. Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi, dan
 - c. Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
- 6) Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan.
Terdiri atas :
 - a. Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan I,
 - b. Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan II,
 - c. Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan III dan
 - d. Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan IV.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional
Terdiri atas Supervisor, Ketua Tim, dan Anggota Tim.

D. Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II sesuai dengan pembagian wilayah KPP sebagai berikut :

No.	Kantor Pelayanan Pajak	Wilayah Kerja
1.	KPP Madya Bekasi	Sebagian Wilayah Provinsi Jawa Barat
2.	KPP Madya Karawang	Sebagian Wilayah Provinsi Jawa Barat
3.	KPP Pratama Cibitung	Kecamatan Cibitung Kecamatan Tambun Selatan Kecamatan Tambun Utara Kecamatan Tarumajaya Kecamatan Babelan Kecamatan Sukawangi Kecamatan Muaragembong Kecamatan Tambelang
4.	KPP Pratama Cikarang Utara	Kecamatan Cikarang Timur Kecamatan Cikarang Utara Kecamatan Kedungwaringin Kecamatan Karangbahagia Kecamatan Sukatani Kecamatan Sukakarya Kecamatan Pebayuran Kecamatan Cabangbungin
5.		Kecamatan Cikarang Selatan

	KPP Pratama Cikarang Selatan	Kecamatan Cikarang Pusat Kecamatan Cibarusah Kecamatan Bojongmangu Kecamatan Cikarang Barat Kecamatan Cikarang Baru Kecamatan Setu
6.	KPP Pratama Karawang	Kabupaten Karawang
7.	KPP Pratama Subang	Kabupaten Subang
8.	KPP Pratama Indramayu	Kabupaten Indramayu
9.	KPP Pratama Cirebon Satu	Kota Cirebon
10.	KPP Pratama Cirebon Dua	Kabupaten Cirebon
11.	KPP Pratama Kuningan	Kabupaten Kuningan
12.	KP2KP Majalengka	Kabupaten Majalengka

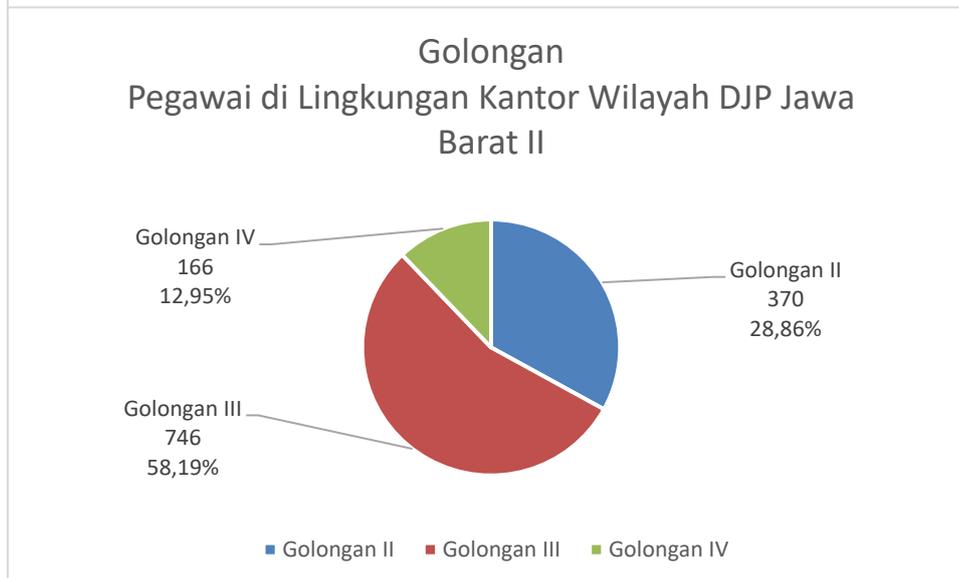
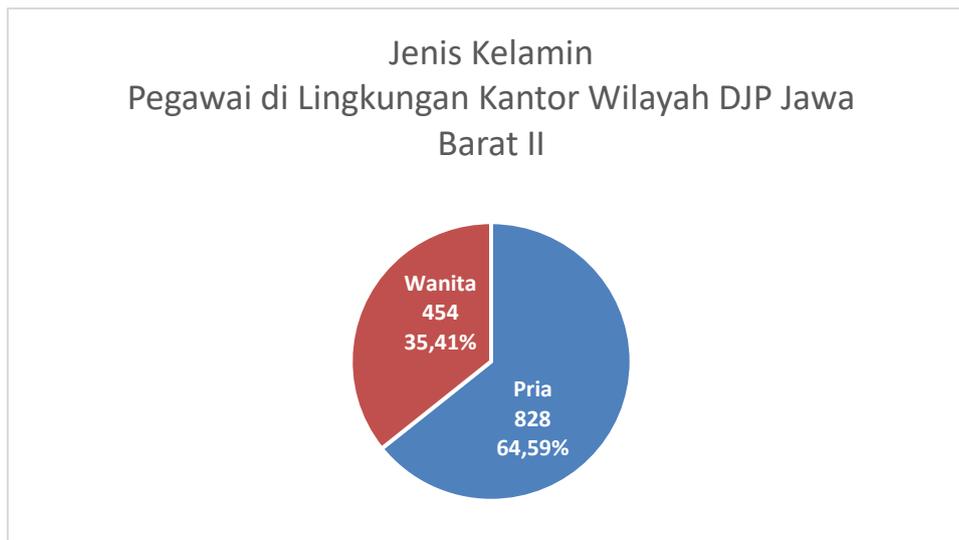
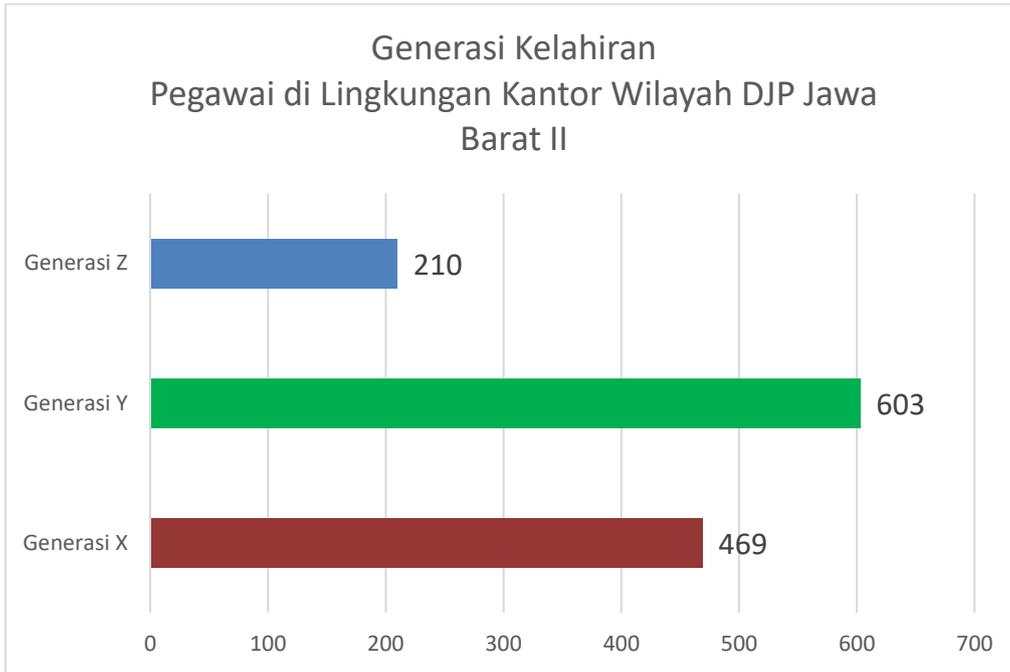
E. Profil Sumber Daya Manusia Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II

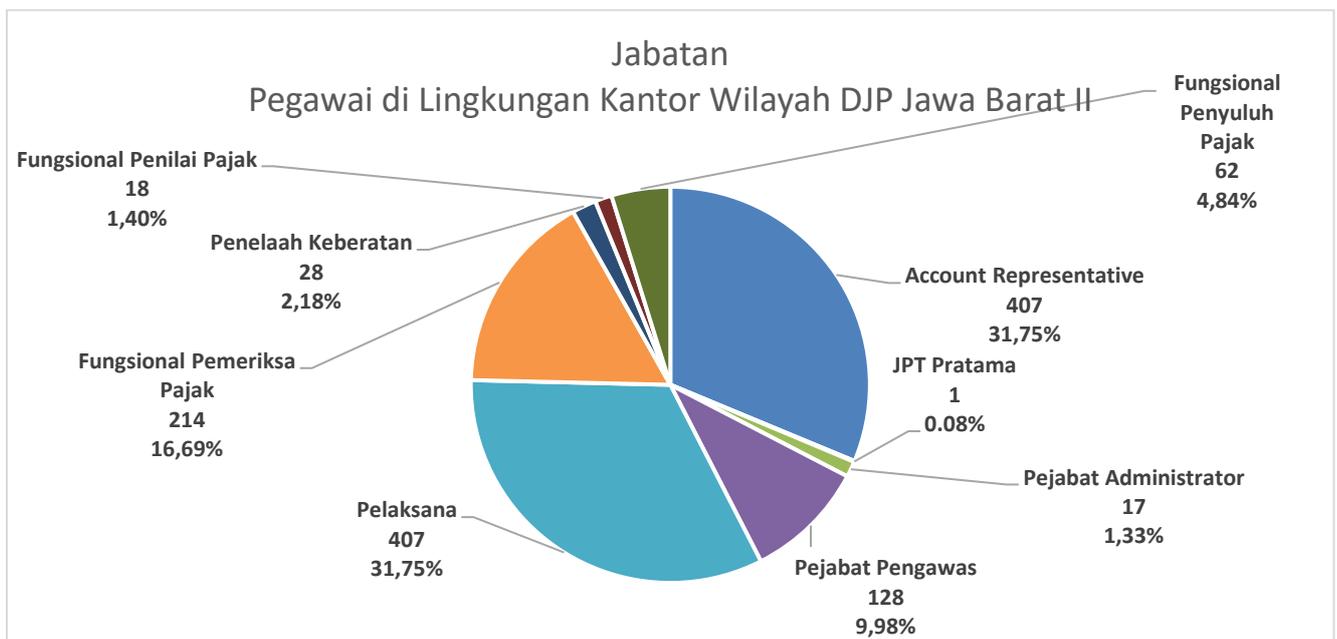
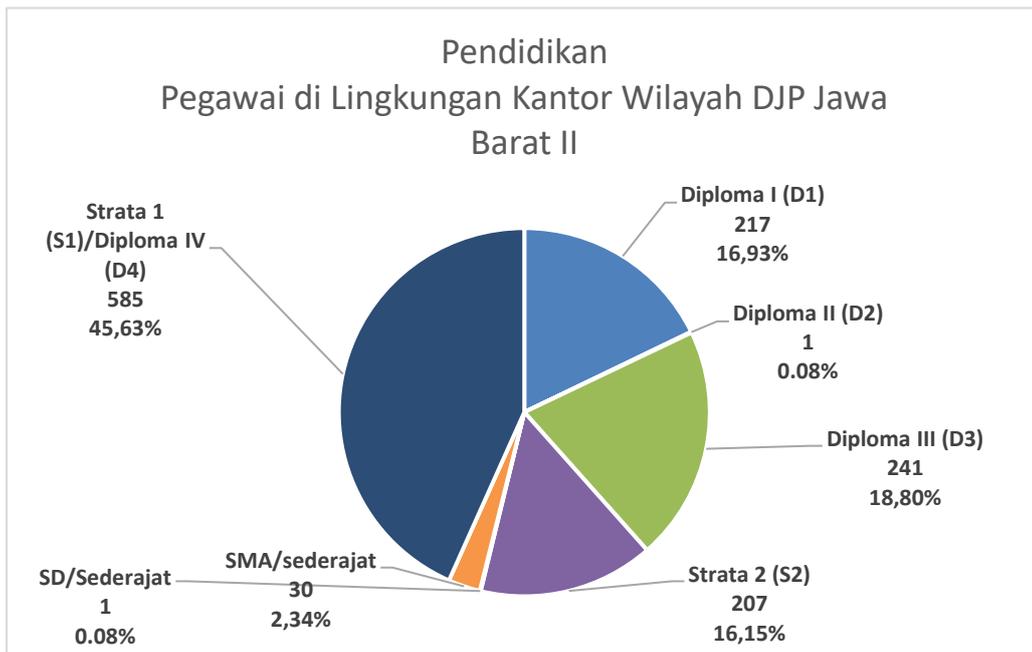
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II didukung oleh Sumber Daya Manusia yang didominasi oleh gender laki-laki mencapai 64,59% (828 orang) dari total keseluruhan pegawai sejumlah 1282 orang. Seluruh pegawai tersebut tersebar hampir merata di seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II dengan peta sebaran di masing-masing unit kerja sekitar 5,9% sd 11,8% dari seluruh pegawai. Dari tingkat pendidikan komposisi terbesar adalah pendidikan S1/ D4 dengan jumlah persentase mencapai 45,63%.

Berikut disampaikan detail komposisi pegawai berdasar pangkat/golongan, pendidikan dan jenis kelamin, di seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II.

Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Persentase
Kanwil DJP Jawa Barat II	154	12,01%
KP2KP Majalengka	7	0,55%
KPP Madya Bekasi	123	9,59%
KPP Madya Karawang	125	9,75%
KPP Pratama Cibitung	108	8,42%
KPP Pratama Cikarang Selatan	126	9,83%
KPP Pratama Cikarang Utara	95	7,41%
KPP Pratama Cirebon Dua	94	7,33%
KPP Pratama Cirebon Satu	87	6,79%
KPP Pratama Indramayu	79	6,16%
KPP Pratama Karawang	118	9,20%
KPP Pratama Kuningan	95	7,41%
KPP Pratama Subang	71	5,54%
Jumlah	1282	100,00%

Rentang Usia	Jumlah	%
18 s.d 25	47	3,67%
26 s.d 35	463	36,12%
36 s.d 45	333	25,98%
46 s.d 55	377	29,41%
Diatas 55	62	4,84%
Jumlah	1282	100,00%





F. Peran Strategis Organisasi

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II melaksanakan peran strategis dengan mendapat mandat dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.50.776.978.209.000,- untuk target APBN. Oleh karena itu dalam pencapaian mandat yang telah diberikan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II menjalankan fungsi strategisnya yaitu melaksanakan analisis, bimbingan teknis, evaluasi, pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan, serta pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perpajakan di lingkungan wilayah kerja yang menjadi wewenangnya.

Dalam hal melaksanakan peran strategis ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II selalu berkoordinasi dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II. Sehingga tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II tercapai dan berjalan seiring dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Pelaksanaan peranannya diantaranya yaitu :

1. Melaksanakan Koordinasi dengan Satuan Kerja di bawahnya, misalnya mengadakan Rapat Koordinasi Daerah dengan KPP maupun pelaksanaan Rapat Koordinasi Gabungan dengan Kanwil DJP lainnya yang memiliki kesamaan karakteristik maupun dengan Direktorat lain di Kementerian Keuangan yang merupakan sebagai salah satu bentuk dari sinergi antar direktorat, hal ini penting karena dengan adanya koordinasi akan terwujud sinergi yang pada akhirnya akan menunjang pada peningkatan kinerja.
2. Monitoring dan Evaluasi Satuan Kerja di bawahnya. Pelaksanaan monitoring berbasis kinerja dengan berpedoman pada rencana kerja yang telah disepakati dan ditetapkan, dengan pelaksanaan monitoring tersebut dapat diketahui apakah program yang telah dicanangkan berjalan dengan tepat sesuai dengan rencana atau tidak, serta dapat segera diketahui apabila terjadi kendala dalam pelaksanaannya, dari hasil monitoring tersebut kemudian dilakukan evaluasi dengan melaksanakan analisa, program mana yang berhasil maupun dalam pelaksanaannya mengalami kendala, sehingga dapat dicari solusi atas permasalahan yang dihadapi, pelaksanaan monev ini dilakukan secara periodik dengan sistem penugasan tim *liaison officer* ke KPP-KPP maupun dengan cara pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah yang merupakan salah satu bentuk dari Dialog Kinerja Organisasi.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak hanya berhenti di level unit kerja tetapi sampai dengan SDM di KPP, dimana setiap bulannya dipantau kinerja dari *Account Representative*, Fungsional Pemeriksa, Juru Sita & Kepala Seksi yang diukur dari parameter kinerja berbasis IKU maupun Uraian Jabatan, sehingga dari bulan ke bulan dapat ditingkatkan kinerjanya.

G. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang penyusunan LAKIN, tugas dan fungsi, struktur organisasi, wilayah kerja, profil SDM, serta peran strategis organisasi.
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan tentang penetapan kinerja dan pengukuran kinerja tahun yang bersangkutan.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
 - B. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Pada sub bab ini diuraikan evaluasi atas tiap sasaran strategis dan upaya yang sudah dilakukan pada tiap sasaran strategis untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.
 - C. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
4. Bab IV Penutup
Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

- A Penetapan Kinerja
- B Pengukuran Kinerja



Kawasan
Industri
Karawang

PERENCANAAN KINERJA

A. Penetapan Kinerja

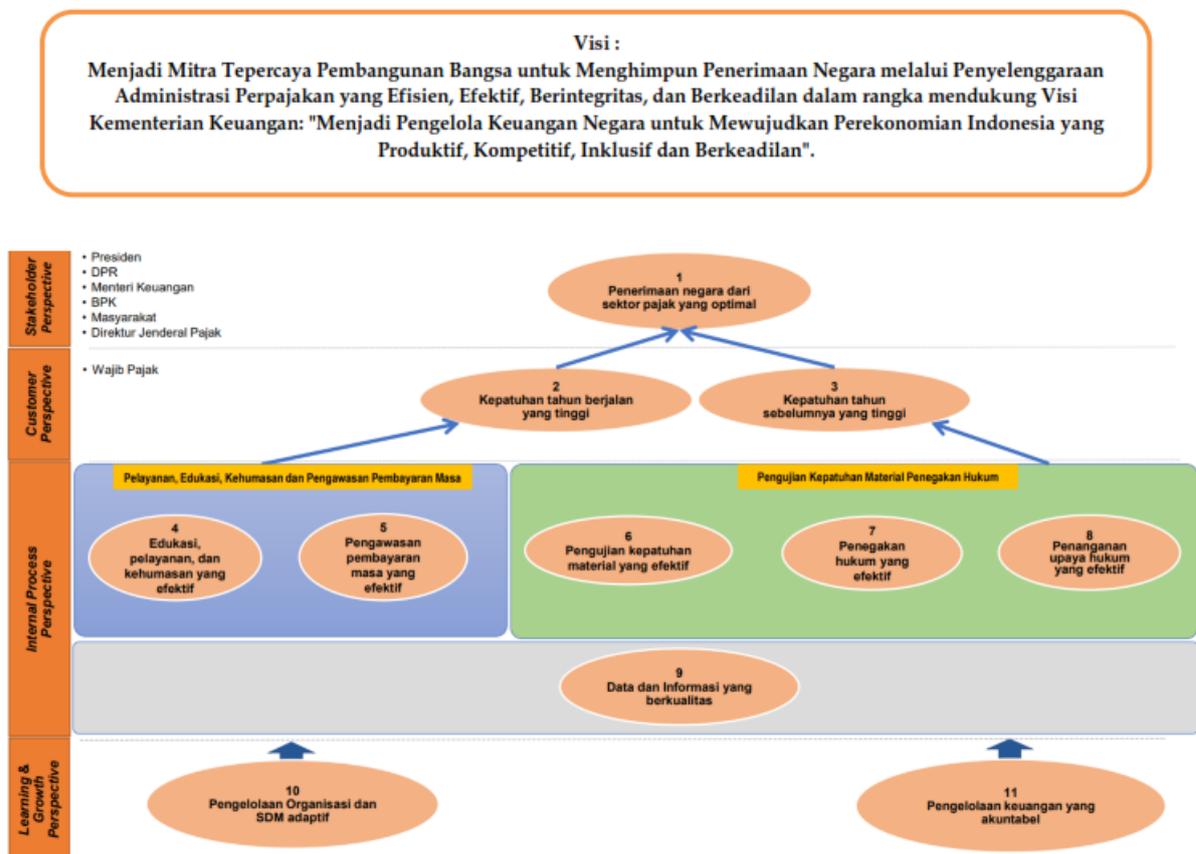
Penetapan/Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk tehnik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen perjanjian kerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja utama.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja utama serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Kedua belas Sasaran Strategis tersebut diatas kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kanwil DJP Jawa Barat II tahun 2024 tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor: PK-34/PJ/2024 sebagaimana dalam diagram berikut:

Peta Strategi



Pada tahun 2024 Kontrak Kinerja dijadikan sebagai dokumen penetapan kinerja. Kontrak Kinerja Pejabat Eselon II dan III berisikan Peta Strategi yang terdiri dari kumpulan beberapa sasaran strategis yang dikelompokkan dalam empat perspektif, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process*, dan perspektif *learning and growth*. Keempat perspektif tersebut memuat 13 Sasaran Strategis (SS). Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Semakin tinggi kewenangan yang dimiliki pejabat terkait, semakin bersifat *outcome* atau *impact*. Semakin rendah posisi pejabat/pegawai yang bersangkutan, IKU yang dimiliki semakin bersifat aktivitas.

Kualitas IKU juga sangat tergantung kepada besarnya *coverage* IKU terhadap pencapaian SS. Semakin besar *coverage* IKU terhadap pencapaian SS, semakin bersifat *activity*.

Dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Tahun 2024, dituangkan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel sebagai berikut :

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
		2b-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100%
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90%
8.	Penanganan upaya hukum yang efektif	8a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86,5%
		8b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%
9.	Data dan informasi yang berkualitas	9a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		9b-N Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
10.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	10a-N Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90%
		10b-N Indeks penilaian integritas unit	100%
		10c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90%
11.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%

B. Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian perhitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang ada. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU serta jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize* dan *stabilize*. Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan 1 IKU dari 5 IKU dan berlaku kelipatannya dengan prioritas IKU *cascading* peta strategi, kemudian IKU *cascading* non peta, selanjutnya IKU non *cascading* dalam pemilihan IKU yang dikonversi. Komponen yang mempengaruhi berikutnya adalah validitas kendali yang akan menentukan besaran bobot Indikator Kinerja Utama.

Adapun status Indeks Capaian Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :



Hijau

$$100 \leq x \leq 120$$

(memenuhi ekspektasi)



Kuning

$$80 \leq x \leq 100$$

(belum memenuhi ekspektasi)



Merah

$$x < 80$$

(tidak memenuhi ekspektasi)

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

- A Capaian Kinerja
- B Evaluasi & Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
- C Realisasi Anggaran

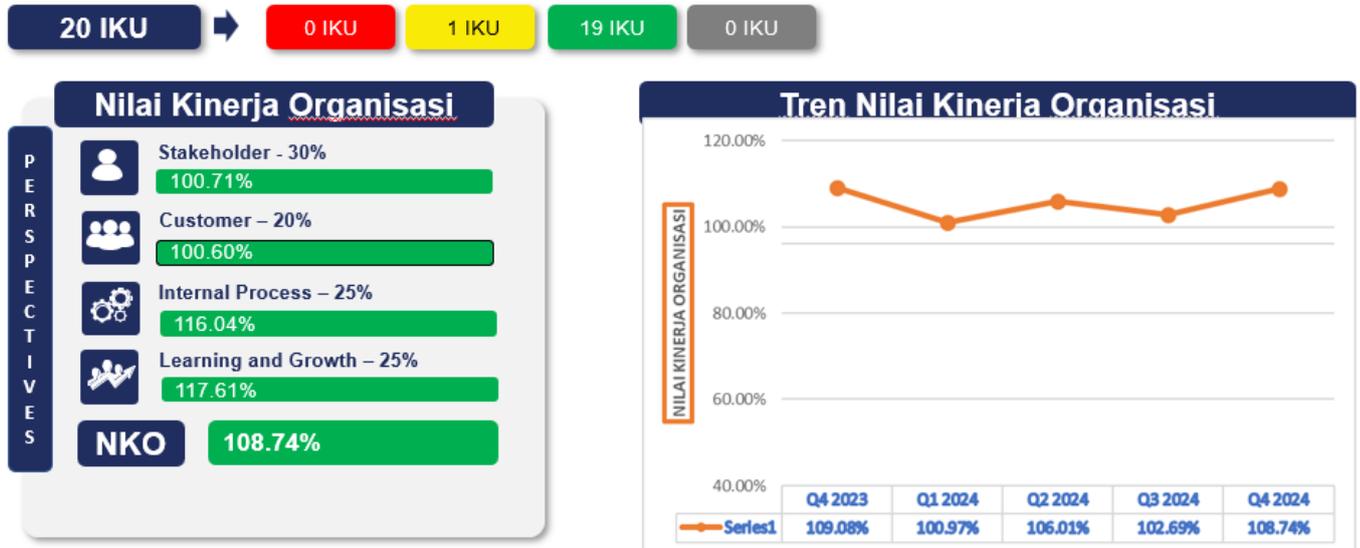


Tambak Ikan
Waduk Darma
Kuningan

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kanwil DJP Jawa Barat II Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam Perjanjian Kerja dengan targetnya. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwi DJP Jawa Barat II adalah sebesar 108,74**



Dari **20 (dua puluh) IKU**, terdapat **19 (sembilan belas) IKU berstatus “hijau”** (capaian realisasi minimal 100% dari target yang ditetapkan), dan **1 (satu) IKU berstatus “kuning”** (capaian realisasi $80\% < x < 100\%$) yaitu :

1. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu (93,74%)

Rincian Status IKU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Kanwil DJP Jawa Barat II Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>		30,00%		100,71
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			100,71
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,12%	100,12
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	101,51	101,51
<i>Customer Perspective</i>		20,00%		100,60
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			101,06
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,12%	100,12
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	102,34%	102,34
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,13
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,13%	100,13
<i>Internal Process Perspective</i>		25,00%		116,04
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif			114,03
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00

4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100,00%	108,05%	108,05
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,89%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			106,87
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100,00%	93,74%	93,74
7	Penegakan hukum yang efektif			120,00
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	120,00%	120,00
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90,00%	112,06%	120,00
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif			118,10
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,50%	99,69%	115,25
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63,00%	84,03%	120,00
9	Data dan Informasi yang berkualitas			117,25
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	113,50%	113,50
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	82,99%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>		25,00%		117,61
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			115,22
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00	114,41	120,00
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00%	115,37%	115,37
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00	99,29	110,32
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi				108,74

B. Evaluasi & Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Strategis 1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

Direktorat Jenderal Pajak sebagai ujung tombak penerimaan Negara pada tahun 2024 diberi tugas untuk mengumpulkan penerimaan dengan Target APBN sebesar **Rp.1.922.786.069.651.741,-**, kemudian di *breakdown* ke masing-masing kantor wilayah, dimana Kanwil DJP Jawa Barat II mendapatkan amanah untuk mengumpulkan penerimaan pajak Target APBN sebesar **Rp. 50.776.978.209.000,-**. Atas target sebesar tersebut, realisasi penerimaan pajak yang dicapai adalah sebesar yaitu **Rp. 50.839.802.528.062,-** atau sebesar **100,12%** (APBN). mengalami kenaikan **1,03%** dari realisasi tahun 2023 yang sebesar **Rp. 50.319.702.914.220,-** sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar **Rp.43.499.260.387.147,-**.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJP Jawa Barat II mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan sebagai berikut :

SS- 1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,12%	100,12%
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	101,51	101,51

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut :

IKU yang pertama dalam Sasaran Strategis – 1 yaitu Persentase Realisasi Penerimaan Pajak. Pencapaian realisasi penerimaan pajak per KPP sebagaimana daftar tabel terlampir :

APLIKASI PORTAL DJP

Kinerja Penerimaan

TAHUN 2024 | BULAN Januari | SAMPAI Desember | UNIT KPP Se-KANWIL | URUT Pencapaian | Perhitungan Total | [Lihat Data](#)

[DOWNLOAD PENYESUAIN PERTUMBUHAN](#)

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN							PENERIMAAN TAHUN LALU		PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN		
			MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO	BRUTO		NETTO	BRUTO	NETTO
1	PRATAMA SUBANG	751,430,166,000	754,695,696,555	0	25,887,285,277	-7,655,165,960	10,632,707,100	783,560,522,972	15,142,165,843	768,418,357,129	554,889,207,100	547,084,823,062	102.26	41.21	40.46
2	PRATAMA CIREBON SATU	742,476,909,000	688,634,285,497	0	75,497,576,515	-25,154,578,438	26,105,536,818	765,082,820,392	17,835,543,568	747,247,276,824	626,006,860,434	620,606,175,178	100.64	22.22	20.41
3	PRATAMA CIKARANG UTARA	2,029,666,659,000	2,054,021,510,783	0	7,764,583,249	-23,835,104,549	26,447,223,654	2,064,418,213,137	23,790,227,718	2,040,627,985,419	1,705,296,224,626	1,675,774,238,328	100.54	21.06	21.77
4	PRATAMA CIREBON DUA	1,065,689,974,000	1,135,647,615,379	0	29,844,453,239	-6,685,392,536	7,469,553,571	1,166,276,229,653	95,198,760,660	1,071,077,468,993	952,578,444,963	894,204,267,902	100.51	22.43	19.77
5	PRATAMA KUNJINGAN	653,605,889,000	650,600,944,241	0	29,848,733,149	-8,896,463,575	8,206,408,558	680,459,642,373	24,031,837,305	656,427,805,068	599,225,971,116	585,525,608,186	100.43	13.56	12.11
6	PRATAMA CIBITUNG	1,651,193,758,000	1,691,658,277,342	0	13,677,686,247	-16,518,032,084	14,765,048,729	1,703,582,980,234	51,454,778,118	1,652,128,202,116	1,578,865,836,047	1,541,593,599,849	100.06	7.9	7.17
7	PRATAMA CIKARANG SELATAN	7,173,765,262,000	7,412,449,865,058	778,854,178	34,843,831,103	-48,297,432,883	46,110,499,993	7,445,585,617,449	267,573,700,854	7,178,011,916,595	6,185,937,951,747	6,017,908,332,141	100.06	20.36	19.28
8	MADYA BEKASI	14,946,034,829,000	16,237,800,967,838	90,066,138,290	40,909,954,910	-122,543,812,555	116,281,906,136	16,362,515,154,619	1,407,008,614,890	14,955,506,539,729	15,661,644,657,905	14,208,676,397,864	100.06	4.48	5.26
9	PRATAMA KARAWANG	4,772,894,680,000	5,238,214,742,735	0	27,332,533,773	-29,086,328,808	26,084,895,328	5,261,645,943,028	486,277,102,624	4,775,368,840,404	4,518,699,066,897	4,180,500,463,469	100.05	16.44	14.23
10	MADYA KARAWANG	16,000,863,148,000	20,004,502,260,873	142,267,772,631	92,554,366,990	-59,254,218,061	71,720,935,335	20,251,701,118,068	4,246,312,454,035	16,005,388,664,033	20,886,531,510,378	19,168,920,511,391	100.03	-3.04	-16.5
11	PRATAMA INDRAMAYU	989,356,935,000	981,916,623,850	0	16,666,637,960	-4,443,578,687	4,446,016,500	998,585,699,623	8,986,227,871	989,599,471,752	934,073,269,143	931,819,062,771	100.02	6.91	6.2
12	PRATAMA KARAWANG SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Jumlah		50,776,978,209,000	56,850,142,790,151	233,112,765,099	394,827,662,412	-353,670,108,136	359,000,832,022	57,483,413,941,548	6,643,611,413,486	50,839,802,528,062	54,203,749,000,355	50,372,703,480,140	100.12	6.05	0.93

Akar masalah pada tahun 2024 kondisi industri pengolahan khususnya sektor otomotif masih mengalami penurunan. Hal ini berimplikasi terhadap penerimaan bruto yang tumbuh tidak terlalu besar. Realisasi penerimaan juga mendapat tekanan dari sisi restitusi yang meningkat cukup signifikan. Upaya yang telah dilakukan oleh KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II bersama dengan bimbingan dan asistensi serta monitoring dari Kanwil DJP Jawa Barat II adalah sebagaimana tergambar di dibawah ini :

- Pembentukan Komite Kepatuhan Kanwil dan KPP tahun 2024
- Penyusunan strategi pengamanan penerimaan pajak 2024
- Mapping SDM Pengawasan tahun 2024 di lingkungan Kanwil DJP Jabar II
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas semua saldo tunggakan pekerjaan baik dari untuk mendukung kegiatan Pengujian Kepatuhan Material
- Pembentukan Transfer Pricing Knowledge Centre (TPKC) untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang sedang menangani kasus Transfer Pricing.
- Pembentukan Tim CTA Kanwil, melakukan analisis data potensi dan memproduksi LHA yang berkualitas
- Monitoring dan Evaluasi

Dalam Sasaran Strategis Penerimaan Pajak Negara yang optimal, IKU yang kedua adalah Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas.

Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas Kanwil DJP Jawa Barat II Tahun 2024 mencapai 101,51%.

Upaya yang telah dilakukan oleh KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II bersama dengan bimbingan dan asistensi serta monitoring dari Kanwil DJP Jawa Barat II adalah sebagaimana tergambar di dibawah ini :

- Pembentukan Komite Kepatuhan Kanwil dan KPP tahun 2024
- Penyusunan strategi pengamanan penerimaan pajak 2024
- Mapping SDM Pengawasan tahun 2024 di lingkungan Kanwil DJP Jabar II
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas semua saldo tunggakan pekerjaan baik dari untuk mendukung kegiatan Pengujian Kepatuhan Material)

- Monitoring dan Evaluasi
- Bimbingan teknis penyusunan prognosa penerimaan pajak untuk Kepala Seksi PKD, administrator system (adsis) dan SDM Pengawasan
- Bimbingan teknis pemanfaatan data dan Dashboard Penerimaan

Indeks capaian Sasaran Strategis Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal adalah sebesar **100.71%**.

Sasaran Strategis-2 Tingkat Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Selain pencapaian penerimaan pajak, misi utama dari Direktorat Jenderal Pajak adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pajak dan masyarakat yang telah menjadi Wajib Pajak untuk meningkat kesadarannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada tahun 2024 tingkat kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan IKU Tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak dengan ukuran rumus yaitu jumlah SPT Tahunan yang disampaikan oleh WP Orang Pribadi Non Karyawan dan Badan dibandingkan dengan jumlah WP Orang Pribadi Non Karyawan dan Badan yang terdaftar yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan.

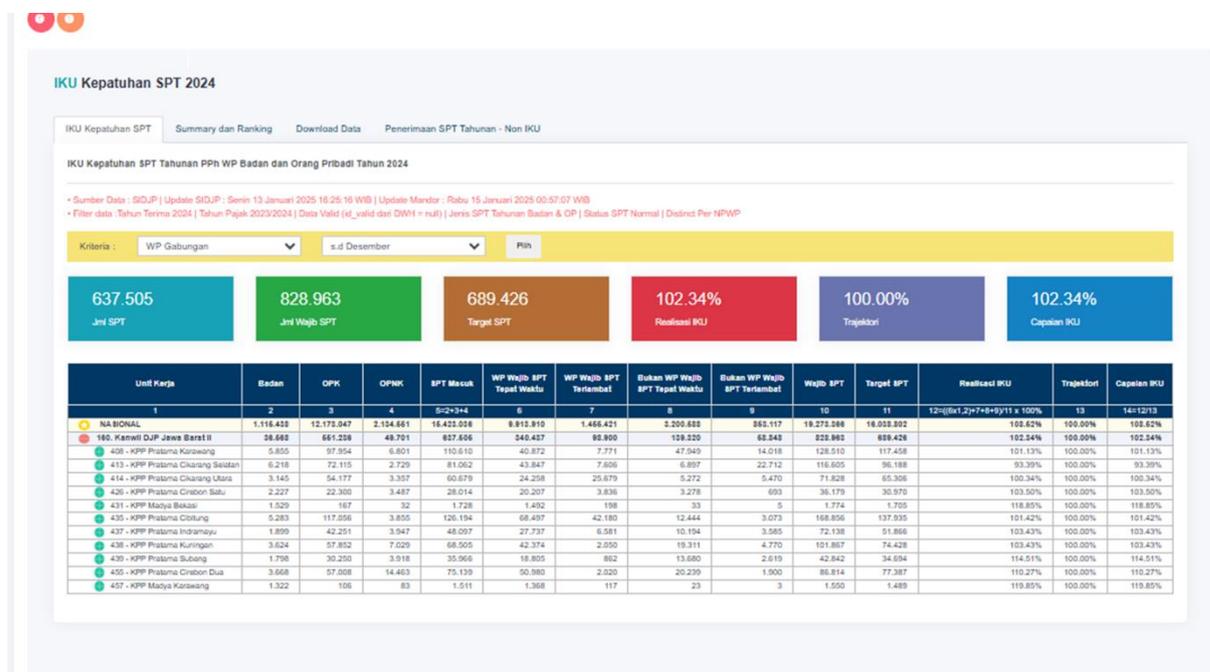
Mengingat kepentingan masyarakat ketika membuat NPWP beraneka ragam jenisnya, sehingga jumlah Wajib Pajak yang terdaftar semakin bertambah. Namun hal ini tidak diikuti dengan kesadaran untuk kewajiban pajaknya, salah satunya penyampaian SPT Tahunan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran pegawai Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kanwil DJP Jawa Barat II untuk menjawabnya. Berbagai upaya telah ditempuh misalnya membuka Bale Pajak di pusat-pusat bisnis, menyelenggarakan jemput bola e filling ke perusahaan pemberi kerja, membuka kelas pajak di Kanwil, melakukan kampanye pajak melalui sebaran informasi di media cetak maupun elektronik.

Tabel Sasaran Strategis 2 yang terdefinisi menjadi 2 (dua) buah Indikator Kinerja Utama :

SS- 2 Tingkat Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	102,34%	102,34%
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,12%	100,12%

Dalam Sasaran Strategis Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi, IKU yang pertama adalah Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, dengan detail realisasi sebagai berikut.



Sebagai daerah Kawasan Industri penyangga ibukota, di Kanwil DJP Jawa Barat II terdapat banyak Wajib SPT yang sebenarnya tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif (WP Pencari Kerja), serta banyak WP Wajib SPT yang masih terdapat WP Non Efektif, WP Pindah, WP yang berbeda tahun buku, WP dalam proses audit. Selain itu Kepatuhan WP menyampaikan SPT Tepat waktu yang masih rendah . Kedua hal tersebut merupakan akar utama masalah kinerja kepatuhan penyampaian SPT di Kanwil DJP Jawa Barat II.

Mitigasi yang dilaksanakan pada tahun 2024 diantaranya:

1. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kepatuhan Wajib Pajak
2. Membuka kelas pajak, jemput bola, live instagram, dan siaran radio secara rutin dalam rangka peningkatan kepatuhan penyampaian SPT
3. Melakukan koordinasi dengan KPP untuk menerbitkan surat teguran kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan
4. Bekerja sama dengan pihak ketiga untuk sosialisasi dan edukasi pelaporan SPT Tahunan
5. Monitoring dan evaluasi Kepatuhan SPT kepada KPP
6. Melakukan monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan kepada KPP
7. Membuka kelas pajak secara rutin, jemput bola, live instagram, siaran radio
8. Membantu KPP jika kesulitan dalam penggunaan Coretax dengan membuat FAQ
9. Bekerja sama dengan pihak ketiga untuk sosialisasi dan edukasi pelaporan SPT Tahunan
10. Melakukan mitigasi dan tindak lanjut atas permasalahan dalam aplikasi SPT demi kelancaran pelaporan SPT

IKU Kedua dalam Sasaran Strategis Dua adalah IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM telah mencapai 100% di triwulan IV tahun 2024. Sektor dominan Kanwil DJP Jabar II seperti Industri Perdagangan, Industri otomotif dan industri pendukungnya yang paling terdampak atas pandemi telah berangsur pulih dari dampak pandemi. Atas kondisi tersebut Kanwil DJP Jawa Barat II melakukan konsinyering dengan perwakilan AR Pengawasan Strategis dan Kewilayahan untuk menyamakan langkah dalam melaksanakan kegiatan PPM (Pengawasan Pembayaran Masa) dan monitoring evaluasi atas kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa.

Berdasarkan target dan realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Kanwil DJP Jawa Barat II per KPP dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

2024 Januari Desember Pilih

Unit Kerja	PPM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
160 - KANWIL DJP JAWA BARAT II	47.573.761.952.000	47.632.273.900.185	100,12%	100,00%	100,12%
408 - PRATAMA KARAWANG	4.672.240.088.000	4.674.705.446.802	100,05%	100,00%	100,05%
413 - PRATAMA CIKARANG SELATAN	6.874.473.206.000	6.878.602.535.275	100,06%	100,00%	100,06%
414 - PRATAMA CIKARANG UTARA	1.913.617.754.000	1.923.676.655.916	100,53%	100,00%	100,53%
426 - PRATAMA CIREBON SATU	693.638.473.000	697.836.376.187	100,61%	100,00%	100,61%
431 - MADYA BEKASI	14.005.511.131.000	14.014.755.967.029	100,07%	100,00%	100,07%
435 - PRATAMA CIBITUNG	1.506.646.263.000	1.507.161.624.418	100,03%	100,00%	100,03%
437 - PRATAMA INDRAMAYU	955.915.459.000	956.141.217.690	100,02%	100,00%	100,02%
438 - PRATAMA KUNINGAN	612.553.984.000	615.172.871.216	100,43%	100,00%	100,43%
439 - PRATAMA SUBANG	694.029.826.000	710.484.092.536	102,37%	100,00%	102,37%
455 - PRATAMA CIREBON DUA	978.422.100.000	982.970.387.336	100,46%	100,00%	100,46%
457 - MADYA KARAWANG	14.666.713.668.000	14.670.766.725.780	100,03%	100,00%	100,03%

Keterangan:
 1. Data realisasi penerimaan menggunakan angka neto menu kinerja penerimaan pada aplikasi appportal.
 2. Data PPM menggunakan angka penerimaan neto dikurangi penerimaan PKM.
 3. Data PKM menggunakan angka penerimaan PKM pada aplikasi Dashboard Revenue Management (DRM).

Indeks capaian Sasaran Strategis Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi adalah sebesar **101,06%**.

Sasaran Strategis-3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Dalam Sasaran Strategis ini terdapat satu IKU yaitu IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). Berikut tabel Sasaran Strategis 3 yang terdefinisi menjadi satu buah Indikator Kinerja Utama :

SS- 3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%	100,13%	100,13%

IKU dalam Sasaran Strategis 3 adalah Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tercapai karena sektor dominan Kanwil DJP Jabar II seperti Industri Perdagangan, Industri otomotif dan industri pendukungnya yang paling terdampak atas pandemi berangsur pulih dari dampak pandemi.

Beberapa rencana aksi telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi pada periode akhir tahun 2024 dengan Merumuskan dan Melaksanakan Program Akselerasi Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dan langkah-langkahnya akan dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi Penerimaan Kepatuhan Tahun 2024 berupa :

1. Coaching SDM Pengawasan (AR dan Kepala Seksi Pengawasan) bulan Oktober 2024
2. Monitoring dan evaluasi penerimaan oleh Komite Kepatuhan Kanwil
3. Optimalisasi pemanfaatan dashboard 20 Wajib Pajak terbesar penentu penerimaan

Rencana aksi yang dilaksanakan pada tahun 2024 diantaranya :

1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penerimaan dan Kepatuhan KPP Tahun 2024
2. Rakorda Tahun 2024
3. Bedah wajib pajak dan tindak lanjut LHA sebagai ekskalasi potensi penerimaan
4. *Sharing Session Success Story AR* Strategis
5. Rapat Komite Kepatuhan Kanwil untuk Merumuskan Strategi Pengamanan Penerimaan dan Kepatuhan dan Strategi Pengawasan 2024
6. Pembahasan dan Tindak Lanjut Rencana Penerimaan Pajak (RenPen) dan Distribusinya
7. Mapping SDM Pengawasan
8. Pembekalan *Account Representative* baru di lingkungan Kanwil

Indeks capaian Sasaran Strategis Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi adalah sebesar **100,13%**.

Sasaran Strategis -4 Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif

Dalam Sasaran Strategis ini terdapat 2(dua) IKU yaitu IKU Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan dan IKU Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan. Berikut tabel Sasaran Strategis 4 yang terdefinisi menjadi 2(dua) buah Indikator Kinerja Utama :

SS- 4 Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88,80%	120%
Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100%	108,05%	108,05%

IKU yang Pertama dalam Sasaran Strategis 4 adalah Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebagai berikut:

Dashboard Penyuluhan													
Data Unit Kerja													
Kode Unit	Nama Unit	Realisasi								Progress			
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU				
		Capaian	Rasio (18,5%)	Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
160	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
408	PRATAMA KARAWANG	100.00 %	18.50 %	40.00 %	28.12 %	79.09 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
413	PRATAMA CIKARANG SELATAN	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	47.27 %	42.18 %	88.80 %	45.12 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
414	PRATAMA CIKARANG UTARA	100.00 %	18.50 %	79.09 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	59.81 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
426	PRATAMA CIREBON SATU	100.00 %	18.50 %	86.36 %	28.12 %	72.73 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
431	MADYA BEKASI	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
435	PRATAMA CIBITUNG	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	43.64 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
437	PRATAMA INDRAMAYU	100.00 %	18.50 %	111.82 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	23.13 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
438	PRATAMA KUNINGAN	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
439	PRATAMA SUBANG	100.00 %	18.50 %	60.36 %	28.12 %	53.15 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
455	PRATAMA CIREBON DUAT	100.00 %	18.50 %	60.91 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
457	MADYA KARAWANG	100.00 %	18.50 %	75.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Beban penyelesaian administrasi perpajakan yang tinggi sehingga penyuluh tidak bisa melaksanakan kegiatan penyuluhan, kurangnya monitoring kepada KPP terkait pencapaian target dan realisasi pelaksanaan edukasi yang telah ditentukan, pemahaman yang kurang terkait kebijakan edukasi (penginputan DSPT, kebijakan perubahan perilaku, pengakuan realisasi kegiatan) menjadi akar masalah pada tahun 2024.

Beberapa rencana aksi telah dilaksanakan pada tahun 2024 diantaranya:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada KPP terkait kegiatan edukasi penyuluhan per triwulan
2. Melakukan koordinasi dengan KPP terkait penentuan Wajib Pajak DSPT
3. Melaksanakan Forum Edukasi perpajakan diikuti oleh Fungsional Penyuluh dan Pelaksana Pelayanan

IKU yang kedua dalam Sasaran Strategis 4 yaitu IKU Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan, IKU ini untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan, penyuluhan maupun kehumasan dari Kanwil DJP Jawa Barat II yang diperoleh dari hasil survey yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat II.

Tujuan Strategis dari IKU ini adalah dengan mengukur tingkat efektivitas pelayanan, penyuluhan dan kehumasan akan menunjang peningkatan kepercayaan stakeholder serta peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang pada akhirnya akan menunjang optimalisasi penerimaan Negara.

Dari hasil survey yang dilakukan, diperoleh Indeks Penyuluhan, Pelayanan dan kehumasan Tahun 2024 sebesar 86,87%, mengalami kenaikan sejumlah 5,22% dari tahun Tahun 2023 sebesar 81,65%%.

Akar masalah IKU ini yaitu unit kerja tidak bisa memonitoring langsung hasil survey secara real-time, pemilihan WP tidak tepat sasaran, target jumlah WP yang menjadi responden ditetapkan mendekati waktu survei sehingga persiapan pemilahan WP minim.

Beberapa rencana aksi telah dilaksanakan pada tahun 2024 diantaranya:

1. Rutin memonitoring hasil survei perbulan
2. Mengimbau KPP setiap triwulan untuk membuat Melakukan pemilahan Wajib Pajak yang akan memberikan feedback positif.
3. Mengoptimalkan Peran Tim Media Sosial dalam penyebaran informasi perpajakan

Indeks capaian Sasaran Strategis Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif adalah sebesar **114,03%**.

Sasaran Strategis -5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif

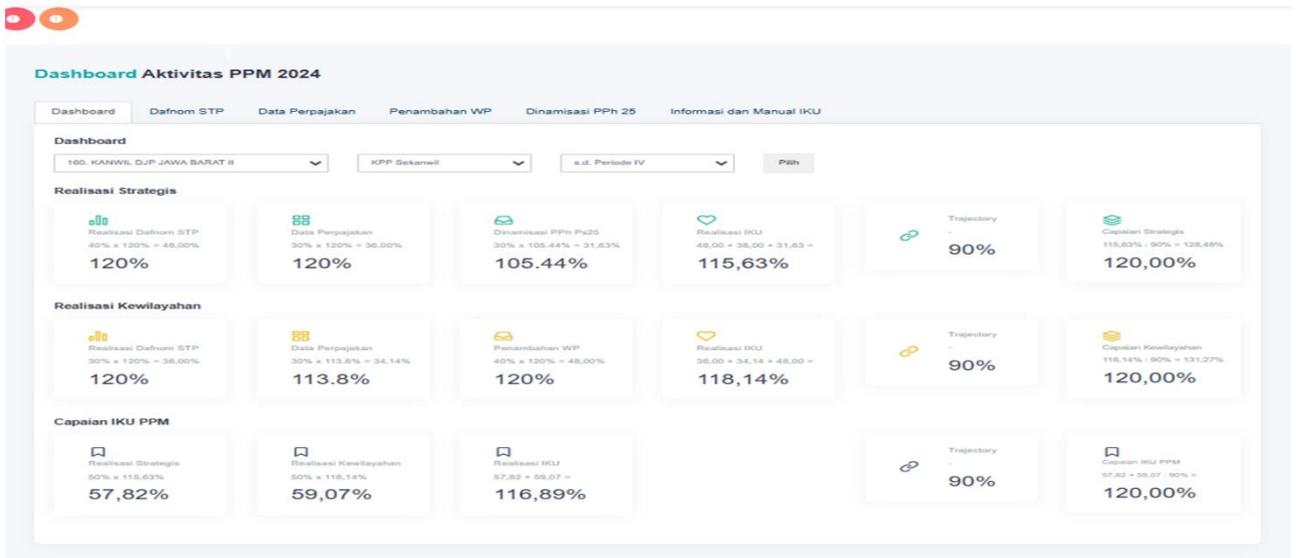
Dalam sasaran strategis ini, terdapat satu Indikator Kinerja Utama, yaitu Persentase pengawasan pembayaran masa.

SS- 5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	116,89%	120%

IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan, Persentase Pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Pengawasan Tindak Lanjut penyandingan data (Data Matching).

Berikut Tabel capaian IKU kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa tahun 2024:



Beberapa rencana aksi telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi pada periode akhir tahun 2024 dengan Merumuskan dan Melaksanakan Program Akselerasi Pengujian Kepatuhan Material (PKM) berupa:

1. Coaching SDM Pengawasan (AR dan Kepala Seksi Pengawasan)
2. Monitoring dan evaluasi penerimaan oleh Komite Kepatuhan Kanwil
3. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut data perpajakan
4. Rakorda tiap triwulan

Indeks capaian Sasaran Strategis Pengawasan pembayaran masa yang efektif adalah sebesar **120%**.

Sasaran Strategis -6 Pengujian kepatuhan material yang efektif

Dalam sasaran strategis ini terdapat 2 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dan IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu.

Penyelesaian Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penerbitan SP2DK

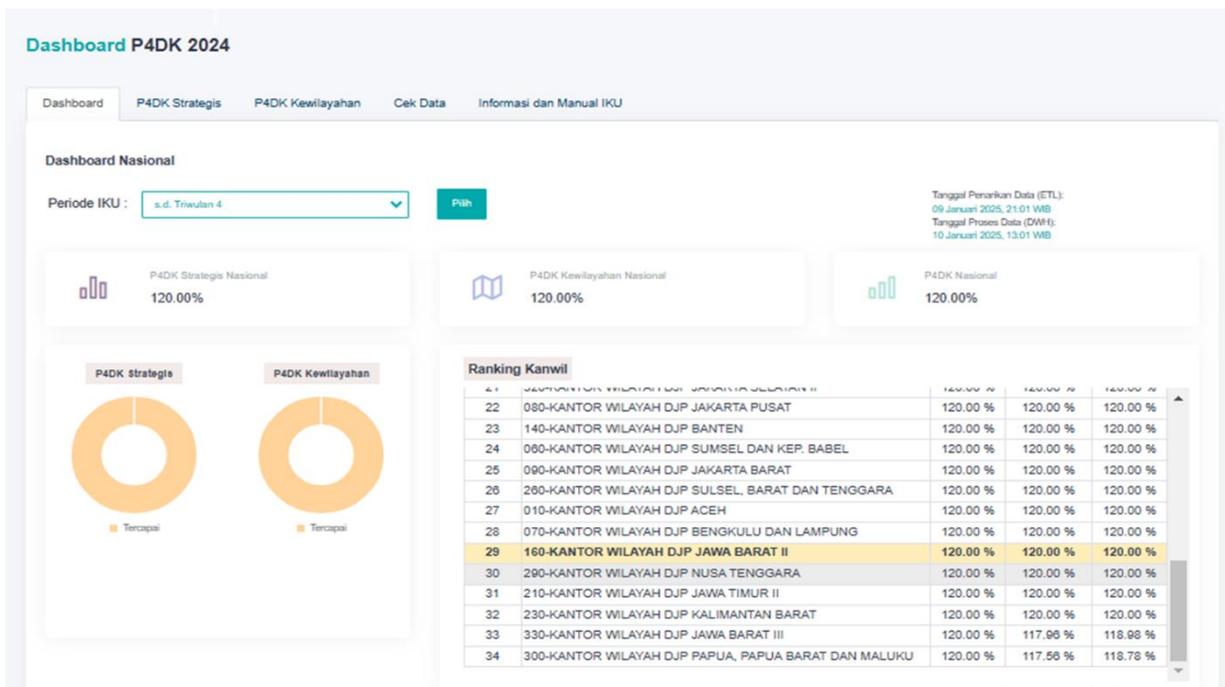
dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

SS -6 Pengujian kepatuhan material yang efektif

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	120%	120%
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%	93,74%	93,74%

Tujuan strategis dari IKU ini yaitu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan wajib pajak diharapkan dapat mendorong penerimaan pajak.

Berikut tabel target, realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan:



IKU yang kedua dalam Sasaran Strategis 6 yaitu IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu. Akar masalah IKU ini yaitu perlu ditingkatkan koordinasi dalam penentuan WP prioritas masing masing sub komite, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi komite kepatuhan

Beberapa rencana aksi telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi pada periode akhir tahun 2024 berupa :

1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penerimaan dan Kepatuhan KPP Triwulan IV Tahun 2024
2. Rakorda ketiga di bulan Oktober 2024
3. Monitoring dan Evaluasi proses Penegakan Hukum kepada kinerja PPNS.
4. Monitoring dan Evaluasi proses Kolaborasi Penegakan Hukum.

5. Akselerasi penelaahan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, untuk persiapan

Berikut tabel hasil IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu :

NO	KODE_IKU	KODE_KANWIL	KODE_UNIT	NAMA_KANWIL	PERIODE	KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)				KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)						KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)			REALISASI IKU KOMP (GABUNGAN)	
						POIN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	PENGAWASAN	PEMERIKSAAN	PENAGIHAN	PENEGAKAN HUKUM	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET		CAPAIAN
9	06b-N	010	010	Kantor Wilayah DJP Aceh	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	77.76%	114.89%	99.56%	85.44%	84.41%	80.00%	118.02%	516.40%	55.00%	120.00%	119.21%
10	06b-N	020	020	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	82.37%	97.20%	85.74%	120.00%	96.33%	80.00%	120.00%	218.44%	55.00%	120.00%	120.00%
11	06b-N	030	030	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	78.36%	82.15%	96.22%	119.74%	94.12%	80.00%	117.69%	154.59%	55.00%	120.00%	119.06%
13	06b-N	040	040	Kantor Wilayah DJP Riau	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	83.14%	80.44%	104.70%	102.99%	92.82%	80.00%	116.02%	291.47%	55.00%	120.00%	118.41%
12	06b-N	050	050	Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat Dan Jambi	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	83.88%	81.85%	100.35%	96.28%	90.59%	80.00%	113.24%	131.89%	55.00%	120.00%	117.29%
15	06b-N	060	060	Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel	TW_IV	4.40	110.00%	100.00%	110.00%	84.49%	115.95%	102.59%	99.78%	100.70%	80.00%	120.00%	192.88%	55.00%	120.00%	117.00%
16	06b-N	070	070	Kantor Wilayah DJP Bengkulu Dan Lampung	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	84.76%	107.64%	102.28%	98.63%	98.33%	80.00%	120.00%	80.72%	55.00%	120.00%	120.00%
4	06b-N	080	080	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	84.42%	75.03%	92.74%	78.05%	82.56%	80.00%	103.20%	67.28%	55.00%	120.00%	113.28%
5	06b-N	090	090	Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	83.95%	85.46%	95.05%	78.18%	85.66%	80.00%	107.07%	78.28%	55.00%	120.00%	114.83%
2	06b-N	100	100	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	79.03%	96.46%	95.26%	81.66%	88.10%	80.00%	110.13%	100.00%	55.00%	120.00%	116.95%
1	06b-N	110	110	Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	83.77%	83.20%	93.24%	120.00%	95.05%	80.00%	116.82%	94.89%	55.00%	120.00%	119.53%
6	06b-N	120	120	Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	79.55%	104.95%	103.34%	120.00%	101.96%	80.00%	120.00%	77.34%	55.00%	120.00%	120.00%
8	06b-N	130	130	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	TW_IV	4.60	115.00%	100.00%	115.00%	86.41%	97.03%	96.21%	108.10%	94.44%	80.00%	118.05%	100.00%	55.00%	120.00%	117.72%
17	06b-N	140	140	Kantor Wilayah DJP Banten	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	80.35%	95.88%	97.61%	77.44%	87.82%	80.00%	106.77%	35.56%	55.00%	64.65%	99.31%
19	06b-N	150	150	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	81.80%	104.03%	96.71%	91.78%	93.58%	80.00%	116.98%	64.13%	55.00%	116.60%	117.77%
20	06b-N	160	160	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	82.39%	85.24%	95.39%	102.09%	91.28%	80.00%	114.10%	22.19%	55.00%	40.35%	93.74%
21	06b-N	170	170	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	85.26%	95.98%	97.15%	120.00%	99.60%	80.00%	120.00%	67.59%	55.00%	120.00%	120.00%
22	06b-N	180	180	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II	TW_IV	4.80	115.00%	100.00%	115.00%	84.52%	100.44%	91.50%	103.92%	95.10%	80.00%	118.87%	122.91%	55.00%	120.00%	118.95%
23	06b-N	190	190	Kantor Wilayah DJP D.I. Yogyakarta	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	87.39%	99.94%	102.26%	96.01%	96.40%	80.00%	120.00%	114.77%	55.00%	120.00%	120.00%
25	06b-N	200	200	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	82.94%	90.77%	105.40%	69.19%	87.06%	80.00%	108.83%	54.88%	55.00%	99.78%	109.47%
24	06b-N	210	210	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II	TW_IV	4.60	115.00%	100.00%	115.00%	86.99%	94.42%	101.43%	120.00%	100.71%	80.00%	120.00%	97.73%	55.00%	104.96%	113.99%
26	06b-N	220	220	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III	TW_IV	4.60	115.00%	100.00%	115.00%	80.12%	86.05%	102.33%	106.87%	93.84%	80.00%	117.30%	35.57%	55.00%	64.67%	100.82%
27	06b-N	230	230	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat	TW_IV	4.60	115.00%	100.00%	115.00%	77.91%	120.00%	103.70%	120.00%	105.40%	80.00%	120.00%	96.53%	55.00%	120.00%	118.50%
28	06b-N	240	240	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan Dan Tengah	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	84.31%	113.82%	98.50%	120.00%	104.16%	80.00%	120.00%	674.20%	55.00%	120.00%	120.00%
29	06b-N	250	250	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur Dan Utara	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	76.40%	113.66%	103.21%	117.13%	102.60%	80.00%	120.00%	196.88%	55.00%	120.00%	120.00%
30	06b-N	260	260	Kantor Wilayah DJP Sulawesi Barat Dan Tenggara	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	87.53%	116.08%	102.65%	98.13%	101.10%	80.00%	120.00%	73.85%	55.00%	120.00%	120.00%
31	06b-N	270	270	Kantor Wilayah DJP Sulawesi Tengah Dan Maluku	TW_IV	4.80	115.00%	100.00%	115.00%	77.46%	97.08%	81.56%	103.27%	89.84%	80.00%	112.30%	65.85%	55.00%	119.36%	115.23%
32	06b-N	280	280	Kantor Wilayah DJP Bali	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	90.91%	106.66%	97.10%	120.00%	103.67%	80.00%	120.00%	97.59%	55.00%	120.00%	120.00%
33	06b-N	290	290	Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	82.81%	117.73%	96.09%	108.93%	102.14%	80.00%	120.00%	97.20%	55.00%	120.00%	120.00%
34	06b-N	300	300	Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat Dan Maluku	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	69.04%	80.30%	96.06%	83.79%	82.30%	80.00%	102.87%	72.12%	55.00%	120.00%	113.15%
7	06b-N	310	310	Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	67.82%	113.55%	105.54%	63.17%	87.52%	80.00%	109.40%	45.69%	55.00%	83.07%	104.68%
3	06b-N	320	320	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	80.24%	114.22%	102.48%	79.73%	94.17%	80.00%	117.71%	103.42%	55.00%	120.00%	119.68%
18	06b-N	330	330	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	78.22%	93.01%	91.01%	91.60%	88.46%	80.00%	110.57%	76.62%	55.00%	120.00%	116.23%
14	06b-N	340	340	Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	88.03%	105.88%	103.08%	120.00%	104.29%	80.00%	120.00%	100.00%	55.00%	120.00%	120.00%

Indeks capaian Sasaran Strategis Pengujian kepatuhan material yang efektif adalah sebesar **106,87%**.

Sasaran Strategis-7 Penegakan hukum yang efektif

Dalam sasaran strategis ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian serta Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi.

Berikut tabel realisasi dan Capaian Sasaran Strategis Penegakan hukum yang efektif yang Optimal:

SS- 7 Penegakan hukum yang efektif			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian	100%	120%	120%
Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90%	112,06%	120%

IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian merupakan perhitungan realisasi dua IKU yaitu tingkat efektivitas pemeriksaan dan persentase penyelesaian penilaian.

Beberapa isu utama dan akar masalah realisasi IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian diantaranya kurangnya pemahaman AR/FPP akan fungsi/tindak lanjut hasil penilaian, kualitas DSPP yang belum optimal, Persentase SKP terbit yang disetujui WP masih rendah, potensi awal untuk pemeriksaan rutin berdasarkan nilai rugi ataupun pengembalian pendahuluan dan bukan perhitungan pajak yang sebenarnya serta pengetahuan terkait Teknis Pemeriksaan dan Peraturan terbaru.

Beberapa rekomendasi aksi telah dilaksanakan sehingga realisasi capaian IKU berhasil tercapai diantaranya:

1. Melaksanakan IHT Peningkatan Desentralisasi SDM Pemeriksa
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Bahan Pemeriksaan & Tunggakan Pemeriksaan
3. Forum penilaian I bulan Maret
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Percepatan Penyelesaian Tunggakan Pemeriksaan baik terutama untuk WP Tahun Pajak 2019 & WP Terdampak CTAS
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Bahan Pemeriksaan
6. Forum P3 (Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan)
7. IHT Pelatihan e-Audit untuk Fungsional Pemeriksa Pajak (15 S.D. 19 Juli 2024)

IKU kedua dalam Sasaran Strategis 7 yaitu IKU Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi. Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

IKU ini dibuat untuk mengukur seberapa besar kegiatan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan dapat memulihkan potensi kerugian pada pendapatan negara serta adanya kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum lain.

	Target	Nilai	Realisasi	Bobot	Capaian
Buper Efektif	19	19.9	104.74%	20%	20.95%
Penyidikan	4	5.98	120%	25%	30.00%
Kolaborasi	114	192	120%	15%	18.00%
Forensik	75%	96%	120%	20%	24.00%
Penagihan	75%	90.0%	120%	20%	24.00%
Total Capaian IKU Kegiatan Penegakan Hukum					116.95%
Capaian terhadap Target Q4 (90%)					120.00%
Capaian terhadap Target Tahunan (90%)					129.94%

Beberapa isu utama dan implikasi atas realisasi IKU Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi adalah bahan baku usulan pemeriksaan Bukti Permulaan belum memadai didukung oleh analisis mandiri terkendala dengan sumber data yang tersedia serta mekanisme penegakan hukum harus melalui proses pengawasan serta penyelesaian tindakan penagihan atas WP DSPC belum semua dilakukan secara tuntas.

Terdapat tiga masalah utama yang ditemui pada tahun 2024 yaitu usulan IDLP dari KPP belum optimal, kegiatan analisis mandiri tidak berjalan serta terdapat WP DSPC yang tingkat ketertagihan rendah namun belum optimal dalam Pemutakhiran WP DSPC.

Indeks capaian yang diperoleh dalam sasaran strategis Penegakan hukum yang efektif adalah sebesar **120%**.

Sasaran Strategis - 8 Penanganan Upaya Hukum yang efektif

Dalam sasaran strategis ini terdapat 2 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu dan Persentase penanganan upaya hukum yang efektif.

Berikut tabel realisasi dan Capaian Sasaran Strategis Penyelesaian keberatan dan non keberatan yang optimal:

SS- 8 Penanganan Upaya Hukum yang efektif

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86,50%	99,69%	115,25%
Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%	84,03%	120,00%

Untuk tahun 2024, total Keputusan Keberatan yang terbit sebanyak 1047 sedangkan realisasi Keputusan Keberatan yang terbit tepat waktu sebanyak 1041 (99,44%). Masih terdapat 6 Keputusan Keberatan atau sekitar 0,56% yang terbit tidak tepat waktu. Untuk Keputusan Non Keberatan yang terbit sebanyak 7564 sedangkan realisasi Keputusan Non Keberatan yang terbit tepat waktu sebanyak 7559 (99,94%), hanya ada 5 Keputusan Non Keberatan yang terbit tidak tepat waktu.

Beberapa isu utama dan akar masalah pada tahun 2024 antara lain:

1. Administrasi permohonan keberatan dan non keberatan di KPP berupa beberapa permohonan yang tidak dilampiri produk hukum (STP) yang dimintakan pengurangan sanksi.
2. Beberapa permohonan melalui *e-objection* mengalami kendala dalam proses penyelesaian keberatan.
3. Untuk keberatan secondary adjustment PPh pasal 26 deviden, penyelesaiannya tergantung unit kerja lain.
4. Kontrol Penyelesaian *by system* belum ada.
5. Manajemen administrasi dan tidak ada sanksi bagi KPP yang terlambat.
6. Beberapa lampiran permohonan *e-objection* tidak dapat di *download* dan tidak ada mekanisme *screening* terhadap permohonan WP melalui *e-objection* ke Kanwil.
7. Perbedaan jangka waktu penyelesaian (IKU) di kanwil khusus dengan kanwil DJP Jabar II.
8. Belum ada aplikasi “peringatan” jatuh tempo IKU

Beberapa rencana aksi telah dilaksanakan pada tahun 2024 diantaranya:

1. Melakukan Pengawasan atas jatuh tempo penyelesaian permohonan Keberatan di setiap bulan yang disampaikan kepada seluruh Penelaah Keberatan melalui Nota Dinas.
2. Membuat group komunikasi dengan pelaksana PIC Keberatan di Seksi Pelayanan KPP untuk memudahkan koordinasi.
3. Pedoman penelitian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (Pasal 36 ayat (1) a).
4. Digitalisasi penyelesaian Keberatan dan Non Keberatan.

Indikator Kinerja Utama yang kedua Persentase penanganan upaya hukum yang efektif Persentase penanganan upaya hukum yang efektif dimana pengukuran indikator kinerja utama berdasarkan tabel dibawah ini:

No	Komponen	Bobot
1	SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya	80%
	Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya	
	Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang diterbitkan x100%	
2	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak sebagaimana rumus pada	20%
	Tingkat Kemenangan = $\frac{\{(0,5 \times \text{Mengabulkan Sebagian}) + \text{Menambah} + \text{Menghapus Dari Sengketa} + \text{Menolak} + \text{Tidak Dapat Diterima}\}}{(\text{Grand Total} - \text{Membetulkan Salah Tulis/Hitung})}$	

Berikut tabel target, realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama penanganan upaya hukum yang efektif:

DAFTAR REKAPITULASI SK KEBERATAN DAN SK NON KEBERATAN YANG TIDAK DIAJUKAN UPAYA HUKUM SELANJUTNYA			
	URAIAN		JUMLAH/PERSEN
A	Total SK yang diterbitkan pada triwulan sebelumnya	(1)	9614
B	Total nilai konstanta SK yang diterbitkan pada triwulan sebelumnya	(2)	9315
C	Persentase SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya	(3) = (2) : (1)	96,89%

REALISASI IKU PERSENTASE PENANGANAN UPAYA HUKUM YANG EFEKTIF				
Uraian		Persentase	Bobot	Nilai Pembobotan
Komponen I	Persentase SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya	96,89%	80%	77,51%
Komponen II	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek	97,14%	20%	19,43%
Persentase penanganan upaya hukum yang efektif			100%	96,94%

Akar masalah tidak tercapainya realisasi IKU ini adalah sulitnya mendapatkan kesamaan persepsi untuk kasus *transfer pricing* serta perbedaan karakter dan/atau kebijakan perusahaan serta peran konsultan Wajib Pajak. Tindakan yang telah dilaksanakan adalah melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak dan Pemeriksa/Account Representative terkait sengketa permohonan yang diajukan sehingga menghasilkan produk hukum yang berkualitas, melakukan pembahasan dengan Tim Pembahas Kanwil atas beberapa sengketa permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu serta melaksanakan Forum/FGD Penelaah Keberatan dan Fungsional Pemeriksa Pajak untuk menyamakan persepsi termasuk penanganan keberatan *transfer pricing*.

Dengan pencapaian realisasi IKU tersebut maka nilai indeks capaian Sasaran Strategis Penanganan Upaya Hukum yang efektif adalah sebesar **118,10%**.

Sasaran Strategis-9 Data dan Informasi yang berkualitas

Yang dimaksud dalam Sasaran Strategis ini adalah Optimalisasi data perpajakan dalam rangka menghasilkan informasi perpajakan yang akurat, lengkap, dan konsisten dalam rangka menunjang kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Dalam sasaran strategis ini terdefiniskan dalam 2 IKU yaitu Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan dan Persentase penghimpunan data regional dari ILAP.

Berikut tabel realisasi dan Capaian Sasaran Strategis Data Perpajakan yang Optimal :

SS- 9 Data dan Informasi yang Berkualitas

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	113,50%	113,50%
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	82,99%	120%

Laporan Hasil Analisis (LHA) adalah hasil analisis potensi pajak dari data WP yang memiliki potensi besar yang diproduksi dari kegiatan pencarian, pemrosesan, penerimaan dan pengidentifikasian data yang bersifat individual yang dilengkapi dengan Kertas Kerja Analisis (KKA) dan disalurkan ke KPP.

Penyediaan data potensi perpajakan dilakukan untuk memberikan data perpajakan yang akurat kepada unit kerja lain sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dalam mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Jenis data potensi perpajakan yang disediakan adalah data yang sekurang-kurangnya memuat informasi:

- a. Identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK (Nomor Induk Kependudukan); dan
- b. Penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal / profile atas WP sebagaimana huruf a diatas.

Data potensi perpajakan tersebut dapat berupa data kepemilikan kendaraan bermotor, data transaksi pengalihan tanah/bangunan, data omzet, dan sebagainya sebagaimana diatur dalam SE-10/PJ/2015 tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengawasan Data.

Akar masalah pada IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah penetapan Wajib Pajak yang akan masuk dalam Penetapan Daftar Sasaran Analisis (DSA) sehingga LHA lebih berkualitas dan dapat dibayar oleh Wajib Pajak masih belum optimal.

Beberapa rencana aksi telah dilaksanakan dalam rangka mencapai realisasi target yaitu Pelaksanaan Bedah Wajib Pajak dan pendampingan dalam rangka tindak lanjut data LHA dan Monitoring dan Evaluasi Tematik: Tindak Lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA)

Berikut tabel target, realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan:

PENETAPAN TARGET LAPORAN HASIL ANALISIS (LHA) TAHUN 2024
KANWIL DJP JAWA BARAT II

KAWIL	KAWIL						BIDANG						SEKSI							
	TARGET LHA	REALISASI LHA	LHA MASUK DSA	CAPAIAN	TRAJECTORY TW 3	CAPAIAN / TRAJECTORY	TARGET LHA	REALISASI LHA	LHA MASUK DSA	CAPAIAN	TRAJECTORY TW 3	CAPAIAN / TRAJECTORY	TARGET LHA	REALISASI LHA	LHA MASUK DSA	CAPAIAN	TRAJECTORY TW 3	CAPAIAN / TRAJECTORY		
KANWIL DJP JAWA BARAT II	21	23	29	122%	80%	120%	BIDANG DATA DAN PENGAWASAN POTENSI PERPAJAKAN	11	11	11	100%	80%	120%	SEKSI DATA DAN POTENSI	4	4	4	100%	80%	120%
														SEKSI BIMBINGAN PENGAWASAN	4	4	4	100%	80%	120%
														SEKSI DUKUNGAN TEKNIK KOMPUTER	3	3	3	100%	80%	120%
														SUMBER TARGET LHA BIDANG DPA	11	11	11	100%	80%	120%
														SEKSI BIMBINGAN PENDAFTARAN	2	3	3	150%	80%	120%
														SEKSI BIMBINGAN EKSTENSIFIKASI	2	4	4	200%	80%	120%
														SEKSI BIMBINGAN PENDAFTARAN PENILAIAN DAN PENGENDALIAN	2	1	1	50%	80%	120%
														SUMBER TARGET LHA BIDANG PDP	6	8	8	133%	80%	122%
														SEKSI ADMINISTRASI DAN BIMBINGAN PEMERIKSAAN	3	3	3	100%	80%	120%
							SEKSI ADMINISTRASI BUKTI PERMULAAN DAN PENYIDIKAN	3	2	2	66%	80%	118%							
							SEKSI BIMBINGAN PENAGIHAN	2	2	2	100%	80%	120%							
							SEKSI INTELIJEN	3	3	3	100%	80%	120%							
							SUMBER TARGET LHA BIDANG PDP	11	11	11	100%	80%	120%							
							TOTAL KAWIL	28	30	30	107%	80%	120%							

IKU kedua dalam sasaran strategis ini adalah Persentase penghimpunan data regional dari ILAP. Merupakan IKU baru pada tahun 2024 dengan menekankan kerja sama dengan Pemerintahan Daerah dalam rangka pemenuhan data dukung perpajakan. Isu utama dan akar masalah pada tahun 2024 adalah kondisi masing-masing pihak pemberi data (Pemerintah Daerah) berbeda-beda, sehingga diperlukan koordinasi dan pendampingan yang lebih intensif dari pihak DJP.

Beberapa rencana aksi dilaksanakan diantaranya menetapkan KEP tentang revisi target data regional ILAP setelah pembahasan dengan Direktorat Informasi Perpajakan dan memastikan KPP menyampaikan surat konfirmasi ketersediaan data dari dinas-dinas terkait.

Berikut tabel target, realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama penghimpunan data regional dari ILAP:

Monitoring Capaian IKU ILAP Regional (Per-KPP)

160 - KANWIL DJP JAWA BARAT II Diurutkan Berdasarkan : Capaian IKU Tahun Data : 2023

NO.	UNIT KERJA	UTAMA			LAINNYA			CAPAIAN IKU	DETIL KP2KP
		Wajib	Kirim	lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap		
1	439 - KPP PRATAMA SUBANG	6	6	6	4	4	4	100	Lihat
2	455 - KPP PRATAMA CIREBON DUA	6	6	5	4	4	3	88,5	Lihat
3	438 - KPP PRATAMA KUNINGAN	12	12	10	5	8	5	86,25	Lihat
4	413 - KPP PRATAMA CIKARANG SELATAN	7	7	6	4	3	2	85	Lihat
5	414 - KPP PRATAMA CIKARANG UTARA	7	7	6	4	3	2	85	Lihat
6	435 - KPP PRATAMA CIBITUNG	7	7	6	4	3	2	85	Lihat
7	408 - KPP PRATAMA KARAWANG	6	6	5	4	4	2	84	Lihat
8	437 - KPP PRATAMA INDRAMAYU	8	6	4	4	4	2	70	Lihat
9	426 - KPP PRATAMA CIREBON SATU	6	6	3	4	4	1	65,5	Lihat

Back Excel

Indeks capaian yang diperoleh dalam sasaran strategis data dan informasi yang berkualitas adalah sebesar **117,25%**.

Sasaran Strategis-10 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Dalam sasaran strategis ini terdefiniskan dalam 3 IKU yaitu IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM, IKU Indeks Penilaian Integritas Unit, dan IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Berikut tabel realisasi dan Capaian Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif :

SS- 10 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90	114,41	120%
Indeks Penilaian Integritas Unit	100%	115,37%	115,37%
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	99,29	110,32%

Dalam IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM, terdapat isu utama yaitu terdapat potensi tidak lulus UKT atau JPM dibawah standar kompetensi apabila pegawai tidak mempersiapkan diri sehingga memengaruhi realisasi NKO.

Pegawai yang belum memenuhi standar kompetensi/tidak lulus uji kompetensi sehingga karir/peringkat/tidak naik ke jenjang yang lebih tinggi dan pegawai yang memiliki jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, serta tunjangan kinerja yang tidak mengalami peningkatan akibat tidak lulus dalam uji kompetensi

Pegawai yang tidak melakukan persiapan sebelum menghadapi uji kompetensi dan menganggap uji kompetensi tidak berdampak kepada pengembangan karir pegawai serta terbiasa dengan pola pengembangan karir pada zaman dahulu dimana belum diperlukan uji kompetensi. Metode Diklat dan Program Pengembangan Kapasitas terdiri dari Metode Klasikal (*classroom*, termasuk *In-House Training*, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis) dan non-klasikal (*On the Job Training*, *E-Learning* serta *workshop* atau konsinyering sepanjang mengandung unsur pengembangan kapasitas).

1. *In House Training* adalah Program Pengembangan Kapasitas yang menggunakan fasilitas milik DJP baik dengan narasumber internal maupun eksternal;
2. Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kapasitas dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan yang menggunakan fasilitas milik di luar DJP dan narasumber eksternal;
3. Sosialisasi/bimbingan teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas oleh narasumber pada unit yang bertanggungjawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di DJP;
4. *On the Job Training* adalah metode pelatihan yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan, dan praktek di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana;
5. *E-Learning* adalah model pembelajaran mandiri melalui portal *Learning Management System* (LMS) DJP, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif, video, maupun *assessment* teknis;
6. *Workshop* atau Konsinyering adalah kegiatan lintas fungsi dan unit di DJP yang bertujuan untuk menghasilkan output tertentu. *Workshop* dan Konsinyering yang diperhitungkan kompetensinya hanyalah yang dalam kegiatannya mengandung unsur pengembangan kapasitas baik dari narasumber internal maupun eksternal.

Berikut tabel target, realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kualitas Kompetensi SDM:

Keterangan :	
-	Nilai Pejabat diatas standar JPM sejumlah 21 orang dari 21 orang
-	Pelaksana dan fungsional lulus UKT sejumlah 31 orang dari 31 orang (pelaksana 23 & fungsional 8)
-	Standar jam pelajaran pegawai s.d. 31 Desember 2024 sejumlah 109,27%

10a-N	TINGKAT KUALITAS SDM
	Formula
	= Aspek I (30%) + Aspek II (35%) + Aspek III (35%)
	100% (30%) + 100% (35%) + 109,27% (35%)
	30%+35%+38,25%
	108,25%

Beberapa rekomendasi aksi yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Melakukan pemetaan hasil assessmen pejabat pengawas di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II yang telah dilakukan bimbingan dan merencanakan pengembangan kompetensi terkait pada tahun 2025
2. Menghimbau dan selalu mengingatkan pegawai agar menyelesaikan kewajiban elearning pada StudiA minimal 2 modul dan KLC Mandatory untuk mengikuti pembelajaran tatap muka melalui Whatsapp Group
3. Mendata dan Merencanakan In House Training Tahun 2025 dari seluruh bidang untuk pengembangan kompetensi pejabat fungsional, pelaksana, dan pejabat structural sesuai ND-327/WPJ.221/2024 tanggal 5 Desember 2024
4. Melaksanakan IHT Soft Competency dalam rangka meningkatkan hasil asesmen sesuai UND-486/WPJ.22/2024

Pada IKU Indeks Penilaian Integritas Unit. Pada tahun 2024, terdapat 2 KPP berhasil meraih predikat ZI-WBK yaitu KPP Pratama Cikarang Selatan dan KPP Pratama Indramayu. Sehingga seluruh KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II sudah meraih predikat ZI-WBK

Beberapa rekomendasi aksi yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Melaksanakan pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai dengan berbagai metode di antaranya SIDAK, Survei ST pegawai, *Observer*, *Surveillance*, Media Sosial yang dilaksanakan setiap caturwulan
2. Membangun keberlangsungan ZI WBK secara berkala dan asistensi keberlangsungan ZI WBK/WBBM
3. Monitoring dan Evaluasi hasil Survei Penilaian Integritas Unit
4. Melakukan penguatan integritas

IKU selanjut nya yaitu Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko. Isu Utama dan Implikasi :

1. Implementasi Manajemen Kinerja kurang efektif
2. Kurangnya perhatian pegawai dalam pengisian realisasi IKI sehingga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
3. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) kurang efektif
4. Perhatian yang kurang dari pegawai terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko dan Mitigasi Risiko

Ada pun akar masalah :

1. Implementasi Imbauan Manajemen Kinerja yang kurang efektif dan tidak tepat waktu.
2. Kurangnya perhatian pegawai dalam memahami manual IKU.
3. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi kurang efektif dan adanya kekurangan bukti pendukung pelaksanaan DKO
4. Budaya sadar risiko perlu diterapkan di lingkungan kerja pegawai

Beberapa rekomendasi aksi yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Melaksanakan imbauan kinerja Triwulan IV Tahun 2024 sesuai ND-2305/WPJ.22/2024 tanggal 30 Oktober 2024
2. Memeriksa kriteria perhitungan laporan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II

Indeks capaian Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif yang diperoleh adalah sebesar **115,22%**.

Sasaran Strategis -11 Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Maksud dari sasaran strategis ini adalah dana yang tersedia dalam data isian pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

Berikut tabel realisasi dan capaian Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan yang akuntabel:

SS- 11 Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	120%	120%

Kualitas pelaksanaan anggaran diukur dengan menggunakan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE 35/MK.01/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2024 adalah sebesar 99,86% dari target 100%. Angka realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	171	015	655497	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II	Nilai	100.00	100.00	99.30	100.00	100.00	100.00	100.00	99.86	100%	0.00	99.86
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.86	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.83				100.00				

Beberapa rencana aksi telah dilakukan diantaranya:

1. Menyesuaikan kembali kebutuhan anggaran tiap bidang melalui mekanisme revisi anggaran.
2. Menyusun rencana pencairan dana triwulan IV yang disesuaikan dengan kebutuhan anggaran rencana kerja masing-masing bidang.
3. Melaksanakan pencairan dana sesuai dengan rencana pencairan dana yang telah disusun dengan memperhatikan target penyerapan triwulan IV.
4. Melaksanakan pengelolaan UP tunai/non tunai dengan baik dan melakukan *revolving* UP tepat waktu.
5. Memperhatikan tanggal-tanggal penting akhir tahun.

Indeks capaian Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan yang akuntabel yang diperoleh adalah sebesar **120%**.

D. Realisasi Anggaran

Anggaran yang digunakan sebagai penunjang dan pencapaian tujuan dan sasaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Jawa Barat II pada tahun 2024 bersumber dari Program Peningkatan & Pengamanan Penerimaan Pajak, Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.658.216.000 dengan realisasi 93,52% sebesar Rp. 11.838.175.750 dengan rincian sebagai berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	655497 KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II	PAGU REALISASI	1,109,046,000 1,075,525,000 (96.98%)	11,426,420,000 10,650,576,640 (93.21%)	122,750,000 112,074,110 (91.30%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	12,658,216,000 11,838,175,750 (93.52%)
		SISA	33,521,000	775,843,360	10,675,890	0	0	0	0	0	0	820,040,250
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	1,109,046,000 1,075,525,000 (96.98%)	11,426,420,000 10,650,576,640 (93.21%)	122,750,000 112,074,110 (91.30%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	12,658,216,000 11,838,175,750 (93.52%)
		SISA	33,521,000	775,843,360	10,675,890	0	0	0	0	0	0	820,040,250



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	PAGU REALISASI	0 0.00%	6,457,962,000 6,273,741,701 (97.15%)	122,750,000 112,074,110 (91.30%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	6,580,712,000 6,385,815,811 (97.04%)
		SISA	0	184,220,299	10,675,890	0	0	0	0	0	0	0
2	4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	PAGU REALISASI	1,109,046,000 1,075,525,000 (96.98%)	260,100,000 196,900,000 (75.70%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1,369,146,000 1,272,425,000 (92.94%)
		SISA	33,521,000	63,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara	PAGU REALISASI	0 0.00%	616,685,000 555,014,488 (90.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	616,685,000 555,014,488 (90.00%)
		SISA	0	61,670,512	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	PAGU REALISASI	0 0.00%	1,181,549,000 1,122,325,069 (94.99%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1,181,549,000 1,122,325,069 (94.99%)
		SISA	0	59,223,931	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	PAGU REALISASI	0 0.00%	1,138,485,000 1,006,399,235 (88.40%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1,138,485,000 1,006,399,235 (88.40%)
		SISA	0	132,085,765	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6209 Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	PAGU REALISASI	0 0.00%	606,231,000 392,519,582 (64.75%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	606,231,000 392,519,582 (64.75%)
		SISA	0	213,711,418	0	0	0	0	0	0	0	0
7	6210 Pengawasan dan Penegakan Hukum	PAGU REALISASI	0 0.00%	1,105,408,000 1,103,676,565 (94.70%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1,105,408,000 1,103,676,565 (94.70%)
		SISA	0	61,731,435	0	0	0	0	0	0	0	0

BAB IV

PENUTUP

 Lampiran



Keraton
Kasepuhan
Cirebon

PENUTUP

Pencapaian kinerja Kanwil DJP Jawa Barat II pada tahun 2024 telah menunjukkan hasil yang optimal dari upaya yang telah dilaksanakan oleh seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II sepanjang tahun 2024. Dari 11 Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama yang ada, seluruhnya indeks capaiannya diatas 100%, dan tidak ada sasaran strategis yang indeks capaiannya $80% < x < 100%$ mau pun sasaran strategis yang indeks capaiannya dibawah 80% menunjukkan adanya perbaikan dari hasil kinerja pada tahun sebelumnya.

Evaluasi atas satu sasaran strategis yang realisasi pencapaiannya masih dibawah target telah dilaksanakan, sehingga di tahun 2025 satu sasaran strategis tersebut dapat diupayakan seoptimal mungkin dan dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Langkah-langkah yang diambil di awal tahun 2025 adalah dengan melakukan kegiatan IHT Refleksi 2024 Menuju Keberhasilan 2025 melalui kegiatan *morning activity* yang diikuti hampir seluruh pegawai DJP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II dengan tujuan konsolidasi internal, menguatkan satu komitmen untuk dapat mencapai target kinerja yang telah diamanahkan, kemudian ditindaklanjuti dengan Rapat Evaluasi capaian kinerja per seksi/sub bagian di tiap-tiap bagian/bidang melakukan paparan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta capaian Indikator Kinerja Utama per seksi/ sub bagian, selanjutnya hasil evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan *action plan* serta *time schedule* pelaksanaan sepanjang tahun 2025.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang.